



Penerapan Akuntansi Publik dalam Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah di Kantor Koperasi Usaha Kecil Kabupaten Mandailing Natal

Abdul Nasser Hasibuan¹, Ali Hardana^{2*}, Lismawati Hasibuan³, Try Wahyu Utami⁴,
Sulaiman Efendi Siregar⁵

abdulnasserhasibuan@uinsyahada.ac.id¹, alihardana@uinsyahada.ac.id^{2*},
lismawati@uinsyahada.ac.id³, utami@uinsyahada.ac.id⁴, sulaimanefendi@uinsyahada.ac.id⁵

¹Program Studi Ekonomi Syariah

^{1,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi Syariah

^{1,2,3,4,5}UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Received: 28 02 2023. Revised: 14 03 2023. Accepted: 14 04 2023.

Abstract : The term governance is actually an old term that was re-popularized by the World Bank in 1992 in its report entitled Governance and Development. The World Bank underscored that governments are the source of development failures. A great government will result in bad governance. "Big government is bad governance". The purpose of this study is to understand implementation strategies regarding accountability and accountability, as well as their implications for how public sector employees work at the Mandailing Natal district office. Data analysis uses a descriptive methodology to gather, transform, classify, interpret, and analyze data to provide clear and accurate information about the problem. The four pillars of the strategic planning process are vision (foresight), consistency, decentralization, transparency, responsiveness, professionalism, and competence. The criteria that writers have in mind when reviewing and analyzing the work of the Representative Office Mandailing Natal Corporation include validity and rigor, professionalism, and a commitment to helping others. Consistency, accuracy, fairness, transparency, focus, and dependability are the bots that are mentioned in the Reporting.

Keywords : Accountability, Performance, Public Sector Accounting

Abstrak : Frasa tata kelola sebenarnya adalah istilah lama yang dihidupkan kembali oleh Bank Dunia dalam studi tahun 1992 Tata Kelola dan Pembangunan. Bank Dunia menegaskan bahwa kegagalan pembangunan disebabkan oleh pemerintah. Pemerintahan yang buruk akan dihasilkan dari pemerintahan yang besar. Pemerintahan berskala besar adalah pemerintahan yang buruk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami strategi implementasi mengenai akuntabilitas dan akuntabilitas, serta implikasinya terhadap cara kerja pegawai sektor publik di kantor kecamatan Mandailing Natal. Analisis data menggunakan metodologi deskriptif untuk mengumpulkan, mengubah, mengklasifikasikan, menafsirkan, dan menganalisis data untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah tersebut. Empat pilar proses perencanaan strategis adalah visi (foresight), konsistensi, desentralisasi, transparansi, daya tanggap, profesionalisme, dan kompetensi. Kriteria yang ada dalam pikiran penulis ketika meninjau dan menganalisis karya Kantor Perwakilan Mandailing

Natal meliputi validitas dan ketelitian, profesionalisme, dan komitmen untuk membantu orang lain. Konsistensi, akurasi, keadilan, transparansi, fokus, dan keandalan adalah bobot yang disebutkan dalam pelaporan.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Kinerja, Akuntansi Sektor Publik

PENDAHULUAN

Pada laporannya tahun 1992 berjudul *Governance and Development*, Bank Dunia menghidupkan kembali istilah *governance*, yang pada dasarnya merupakan konsep lama. Bank Dunia menekankan bahwa kemunduran dalam pembangunan disebabkan oleh pemerintah. Pemerintahan yang buruk akan dihasilkan dari pemerintahan yang besar. Pemerintahan yang besar adalah tata kelola yang buruk, kata mereka. *Good governance is less government, good governance is better government*. Pada awal tahun 1990-an, gerakan pemerintahan yang baik diluncurkan sebagai bentuk penentangan terhadap gagasan pemerintahan, yang dianggap memiliki banyak kekurangan karena melebih-lebihkan kekuatan, atau kurangnya, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Melalui inisiatif "*good governance*" yang didirikan oleh organisasi donor seperti Bank Dunia, ADB, IMF, dan lainnya pada akhir 1990-an, ide ini diperkenalkan ke Indonesia.

Program ini diintegrasikan ke dalam program bantuan/pinjaman, termasuk bantuan teknis kepada pemerintah dan masyarakat sipil. Organisasi non-pemerintah menyambut baik program ini untuk revitalisasi diri, dan lembaga pemerintah menyambutnya untuk memerangi delegitimasi, yang kemudian menentukan arah reformasi birokrasi pemerintah. Istilah-istilah seperti *Less Government, Entrepreneurial Government*, dan sejenisnya sudah menjadi wacana yang ditulis oleh (David & Ted, 1992; Osborne & Gaebler, 1992), yaitu *Reinventing Government*, yang kemudian menjadi populer dengan *Entrepreneurial Government*, sebelum wacana *good governance* mendominasi arah reformasi birokrasi pemerintah di Indonesia (Pemerintah wirausaha).

Menurut penulis buku *Reinventing Government*, alasan utama mengapa pemerintah gagal adalah karena ketidakmampuan manajemen. Masalahnya bukan pada apa yang dilakukan pemerintah, tetapi dengan bagaimana menyikapinya. Buku ini dipandang menandai peluncuran gerakan *good governance*. Selanjutnya, pada tahun 1996. Sesuai dengan tanggung jawab utama masing-masing, departemen pemerintah, bagian, atau lembaga negara di pusat dan daerah harus menyadari sejauh mana akuntabilitas mereka sendiri karena ini termasuk keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan misi lembaga yang bersangkutan.

Akuntabilitas kinerja, menurut LAN dan BPKP, mengacu pada kewajiban menjawab pertanyaan tentang kinerja dan kegiatan seseorang atau badan hukum dari pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk meminta informasi atau akuntabilitas. Menurut (Ledvina, 1991), akuntabilitas kinerja adalah evolusi dari tindakan yang dilakukan oleh seorang perwira, apakah mereka masih dalam lingkup kekuasaannya atau telah jauh melampauinya.

Pedoman berikut harus diperhatikan saat mengadopsi akuntabilitas dalam lembaga pemerintah: 1) Untuk mengawasi pelaksanaan misi dan mempertanggungjawabkannya, seluruh pegawai instansi pemerintah harus memiliki komitmen dan kepemimpinan. 2) Diperlukan suatu sistem yang dapat memastikan bahwa sumber daya digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. 3) Harus dapat menunjukkan seberapa baik tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai. 4) Harus fokus pada pencapaian tujuan dan visi, serta hasil dan keuntungan yang diwujudkan. Masih bisa diperdebatkan apakah sektor swasta, yang kemajuan akuntansinya dianggap lebih cepat oleh beberapa ilmuwan, sebenarnya memiliki teori akuntansi yang mapan. Sebuah teori perlu didukung oleh banyak penelitian di mana hipotesis yang dapat diuji dibuat. (Khairani et al., 2023; Ulum, 2011; Yahya, 2006) Kemampuan untuk menjelaskan atau menjelaskan fenomena yang ada (kemampuan untuk menjelaskan), kemampuan untuk memprediksi (kemampuan untuk memprediksi), dan kemampuan untuk mengendalikan fenomena adalah tiga sifat dasar teori (kemampuan untuk mengendalikan fenomena yang diberikan).

Pemerintah yang paling sedikit adalah pemerintah terbaik, adalah ide panduannya. Ide dan prinsip ini menyebar dengan cepat ke banyak negara, termasuk Indonesia. Terbitnya beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, yang berfungsi sebagai bentuk dan cermin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Kusnadi, 2015). Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur selaku penyelenggara pelaksana daerah di bidang otonomi daerah penyelenggara pemerintahan. Selain itu, ia menjawab kepada Presiden dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Di sisi lain, Bupati atau Walikota bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dalam pelaksanaan pemerintahan dan wajib menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pengarah dan pengawasan. (Hardana, Khairani, et al., 2022; Hardana, Nurhalimah, et al., 2022; Hasibuan, 2022; Windari & Hasibuan, 2022).

Sejumlah peraturan pemerintah, telah dirilis sebagai klarifikasi lebih lanjut. Peraturan tersebut tercermin dalam PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Akuntabilitas Kepala Daerah dan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Pemerintah daerah diwajibkan oleh PP Nomor 108 Tahun 2000 untuk menginformasikan kepada publik tentang seberapa baik kinerja administrasi pemerintahan. Masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara teori adalah lima tahun untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan penjelasan PP Nomor 108 Tahun 2000. (Hardana, Nasution, et al., 2022; Hasibuan & Nofinawati, 2021; Irmawati et al., 2022). Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran kepala daerah kepada DPRD bukanlah sarana untuk memakzulkan kepala daerah; sebaliknya, ini adalah sarana untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintah daerah. Akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD dimaksudkan untuk meningkatkan peran pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan pemerintah daerah.

Menurut uraian mekanisme, akuntabilitas pada dasarnya bersifat horizontal. Mekanisme dan isi pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat melalui DPRD dimulai ketika DPRD mengesahkan rencana strategis kepala daerah, yang juga berfungsi sebagai dasar akuntabilitas kepala daerah. Isi dan periodisasi LPJ, yang mencakup akhir tahun anggaran, kemudian dibahas secara lebih rinci. Akuntabilitas pada akhir masa jabatan dan untuk masalah tertentu. Lebih lanjut, disebutkan dengan jelas bahwa pelaksanaan APBD, berupa perhitungan APBD dan evaluasi kinerja berdasarkan tolok ukur rencana strategis, merupakan tugas akhir tahun anggaran. Kinerja Kepala Daerah selama masa jabatan, serta kinerja Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis, bertanggung jawab atas tugas-tugas umum pemerintahan dan dukungan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan akuntansi sektor publik berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Mandailing Natal.

METODE PENELITIAN

Penelitian studi kasus SAP antara September 2021 dan September 2022. Penelitian ini dilakukan berbasis akrual tahun 2018 di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan melihat penyebab dan keterbatasan yang mempengaruhi adopsi SAP berbasis akrual. Tata

kelola Kabupaten Mandailing Natal menjadi subyek penyelidikan, dengan penekanan khusus pada koperasi usaha kecilnya. (Siregar & Hardana, 2022; Sugiyono & Susanto, 2015). Terdapat dua jenis data yang digunakan untuk memperkuat analisis penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer, proses wawancara berlangsung sebanyak dua kali bersama narasumber dari Koperasi Usaha Kecil di Kabupaten Mandailing Natal. Wawancara awal berlangsung pada Maret 2022, dan wawancara lanjutan terjadi pada Juli 2022. Fakta-fakta ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efek implementasi berbasis akrual SAP. Banyak pendekatan pengumpulan data, termasuk kunjungan, wawancara, kuesioner, dan studi literatur, yang digunakan dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan penjelasan jenis dan sumber data.

Untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil data dan menggunakannya untuk menjawab pertanyaan dan meneruskan tujuan penelitian, pengolahan data diperlukan. Dalam pengolahan data ada dua tahapan yang dilakukan yaitu sebelum lapangan dan selama – sesudah lapangan. Dengan mencari tema dan judul buku yang dijadikan referensi penelitian sebelum bidang tersebut selesai. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan subjek dan judul saat ini, serta melakukan survei lokasi untuk menentukan Pemerintah Kota mana yang akan dijadikan subjek penelitian. Sementara itu, selama dan setelah lapangan dilakukan mengikuti prosedur sebelum ke lapangan, dengan melakukan perjalanan langsung ke lokasi penelitian selama beberapa waktu untuk melakukan kunjungan, wawancara, pengumpulan data, dan informasi untuk mendukung analisis penelitian. (Nazir, 2014) menyatakan bahwa setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data melalui tiga tahapan yaitu penyuntingan (*editing*), penilaian (*scoring*), dan tabulasi (*tabulating*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa dipandang perlu menetapkan, mengatur, dan menyelenggarakan tanggung jawab pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dalam rangka pelaksanaan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dikeluarkan peraturan Bupati dengan nomor 20 tahun 2008 tanggal 10 April 2008, dan ditetapkan di Panyabungan serta ditandatangani oleh Amru Daulay, yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Mandailing Natal, tentang klarifikasi tanggung jawab pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Penyusunan

rencana strategis yang representatif, penyusunan RUT perwakilan yang terdiri dari program kerja pengawasan (PKPT) tahunan dan program kerja administrasi umum (PKAU), pengukuran dan analisis kinerja, serta pelaporan dalam bentuk LAKIP merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah di Mandailing Natal.

Dalam rangka menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator keberhasilan/kegagalan selama lima tahun mendatang, Rencana Strategis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terlebih dahulu disusun melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di seluruh Indonesia. Tugas dan tanggung jawab utama, peraturan pemerintah, arahan presiden, dan hasil rapat kabinet adalah acuan yang digunakan untuk menyusun rencana strategis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Seluruh Koperasi kembali ke daerah masing-masing setelah rencana strategis ditetapkan dan membuat rencana strategis berdasarkan itu. Tim yang terhimpun berkat surat tugas dari pimpinan koperasi menyiapkan rencana strategis tersebut. Rencana Strategis Koperasi 2010-2014 dengan penetapan KEP-3/K/SU/2010/tanggal 29 Januari 2010 merupakan turunan dari Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Mandailing Natal 2010-2014. Visi, misi, strategi, tujuan, program, dan tindakan yang akan dilakukan selama periode rencana strategis semuanya termasuk dalam rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Sebelum pembentukan visi dan misi, penting untuk menilai harapan pemangku kepentingan serta lingkungan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi penentu keberhasilan yang penting.

Rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah disusun dengan menggunakan metodologi yang memungkinkan hal-hal sebagai berikut: (1) Penyelarasan rencana strategis Dinas Koperasi UKM dengan Rencana Strategis Koperasi; (2) Penyelarasan visi, misi, program, dan kegiatan Dinas Koperasi UKM; (3) Keberhasilan indikator outcome program dan indikator *output* kegiatan; (4) Memperkuat Sinergi dengan Pemerintah Daerah; dan (5) Peningkatan Pencitraan. Agar Rencana Strategis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat mengacu dan sesuai dengan Rencana Strategis Koperasi, maka dibentuklah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk melayani visi dan tujuan Koperasi. Maksud dan tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan perluasan dari tujuan dan sasaran KOPERASI. Program dan kegiatan KOPERASI yang dibebankan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah meliputi program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM.

SIMPULAN

Berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi penelitian sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya: 1) Penulis mengidentifikasi visi, konsistensi, desentralisasi, keterbukaan dan transparansi, daya tanggap, profesionalisme, dan kompetensi sebagai nilai-nilai dalam menyusun Perencanaan Strategis (rastra). 2) Temuan nilai-nilai konsistensi, kerja sama, efisiensi dan efektifitas, serta kompetensi dalam penyusunan RKT di Dinas Koperasi UKM Mandailing Natal. 3) Komitmen penting dalam mengevaluasi kinerja. 4) Nilai-nilai temuan saat melakukan aktivitas. Nilai-nilai kerjasama, keadilan, kejujuran, profesionalisme, dan kompetensi menjadi landasan Koperasi Usaha Kecil Menengah Mandailing Natal. Nilai-nilai lainnya meliputi kemandirian, saling mendukung, saling menghormati, dan saling menentramkan. 5) Temuan keutamaan kejujuran dan ketelitian, profesionalisme, serta saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam mengukur dan menganalisis kinerja di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Mandailing Natal. 6) Konsistensi, ketepatan waktu, kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas adalah nilai-nilai yang penulis temukan dalam pelaporan.

DAFTAR RUJUKAN

- David, O., & Ted, G. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Prentice Hall of India.
- Hardana, A., Khairani, D., Daulay, P. B., & Pratiwi, R. (2022). Analisis Pengaruh Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 39–47. <https://doi.org/10.24952/masharif.v7i1.2194>
- Hardana, A., Nasution, J., & Damisa, A. (2022). Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Menabung pada PT. BSI Cabang Padangsidimpuan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2). <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i2.12324>
- Hardana, A., Nurhalimah, N., & Efendi, S. (2022). ANALISIS EKONOMI MAKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMISKINAN (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 21–30. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v1i4.370>
- Hasibuan, A. N. (2022). The Role of Company Characteristics in the Quality of Financial Reporting in Indonesian. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(1), 1–12.
- Hasibuan, A. N., & Nofinawati, N. (2021). Understanding Padangsidimpun City Community

- in Recognizing and Understanding Sharia Banking Products. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 9(2), 206–219. <https://doi.org/10.24952/masharif.v9i2.4762>
- Irmawati, I., Frihatni, A. A., Melinda, M., Kumala, R., Ristiyana, R., Yulianti, M. L., Hardana, A., Ashari, M., Rukmini, M., & Hilda, H. (2022). *Akuntansi Keuangan Tingkat Menengah*.
- Khairani, D., Utami, T. W., & Hardana, A. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jaksya: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 16–22. <https://doi.org/10.24952/jaksya.v1i1.7582>
- Kusnadi, A. (2015). Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3). <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8>
- Ledvina, C. T. (1991). *Geostatistical inference and exploration of coal mine roof strata.(Volumes I and II)*. Northwestern University.
- Nazir, M. (2014). Metode Penelitian Cet. 9. In *Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor*.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). La reinvencción del gobierno: la influencia del espíritu empresarial en el sector público. In *La reinvencción del gobierno: la influencia del espíritu empresarial en el sector público* (p. 494). <https://doi.org/10.33426/rcg/1997/42/1048>
- Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2022). *Metode Penelitian EKonomi dan Bisnis*. Merdeka Kreasi Group.
- Sugiyono, S., & Susanto, A. (2015). Cara Mudah Belajar SPSS dan Lisrel Teori dan Aplikasi untuk Analisis Data Penelitian. *Alfabeta, Bandung*.
- Ulum, A. S. (2011). Peran Pengukuran Kinerja Dalam Mendukung Good Governance Dalam Perspektif Agency Theory. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1). <https://doi.org/10.15294/jda.v3i1.1945>
- Windari, W., & Hasibuan, A. N. (2022). the Effect of Banking Zakat and Corporate Social Responsibility on the Profitability Ratio of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 5(1). <http://dx.doi.org/10.31958/imara.v5i1.2789>
- Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, 7(4), 27–29.